

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah tersebut. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Hal ini berarti, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan karena sering memonitor setiap perencanaan pemerintah dalam satu periode.

Oleh karena itu setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Sehingga pemerintah mampu merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam sebuah perencanaan anggaran. Dalam perencanaan anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Organisasi sektor publik (pemerintah daerah) dalam proses penyusunan anggaran menggunakan pendekatan "*participative budget*" atau disebut juga partisipasi anggaran. Dalam penyusunan anggaran, awalnya Kepala Daerah dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil Rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja).

Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), yang di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran

SetelahBerlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Anggaran yang dihasilkan senantiasa digunakan sebagai tolok ukur bagi kinerja aparat pemerintah daerah. Oleh karenanya, karyawan akan memiliki rasa tanggungjawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran yang melibatkan setiap lapisan manajemen diyakini mampu meningkatkan kinerja individual maupun kinerja organisasi. Hal ini dikarenakan partisipasi anggaran meningkatkan semangat dan tanggung jawabmoral seluruh komponen dalam organisasi yang terlibat guna pencapaian tujuan organisasi (Nurchayani,2010). Partisipasi anggaran menurut Arifin (2012) yaitu keterlibatan para pegawai selama proses penyusunan anggaran tersebut berlangsung, dan untuk mencapai tujuan serta menentukan suatu rencana anggaran. Sedangkan partisipasi anggaran menurut Mattola (2011) yaitu suatu proses yang mengikutsertakan para individu dalam pengambilan keputusan anggaran yang didalamnya mempunyai pengaruh terhadap tujuan anggaran.

Tahap setelah operasionalisasi anggaran adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi proses dan prosedur penggunaan uang publik tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif. Pusat pertanggungjawaban berperan untuk menciptakan indikator kinerja sebagai dasar untuk menilai kinerja (Mardiasmo, 2009:121).

Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Mongeri, 2013). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya adalah komitmen organisasi, budaya organisasi, akuntabilitas, kepuasan kerja dan kepemimpinan Siagian (2002) dalam Mongeri (2013).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi, maka pada penelitian ini mencoba melakukan pengujian ulang. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Setiap variabel akan diuji untuk mengetahui variabel mana yang mempengaruhi kinerja. Variabel moderating yang digunakan dalam penelitian ini, adalah komitmen organisasi, yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini disusun dengan judul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Ponorogo?

2. Apakah komitmen organisasi akan memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Penelitian ini bertujuan :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
2. Membuktikan secara empiris apakah komitmen organisasi akan memperkuat hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.

1.3.2. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Bagi universitas.

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik dan memberikan gambaran awal untuk diadakan penelitian lanjutan, di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah pengembangan teori.

- b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah didalam membuat kebijakan dan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

- c. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang Akuntansi Sektor Publik

khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating.